KABUPATEN BELU

PENGUMUMAN
NOMOR : 931/800.1.2.2/BKPSDMD/VIII/2024

TENTANG

PENERIMAAN CALON PENGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024 tanggal 2 Juli 2024 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 Tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024, maka dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Belu membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut :

I. ALOKASI KEBUTUHAN CPNS

A. Jumlah Alokasi Kebutuhan CPNS

Jumlah alokasi formasi CPNS sebanyak **282 (dua ratus depan puluh dua)** dengan rincian :

1. Formasi Tenaga Kesehatan : 152 formasi
2. Formasi Tenaga Teknis : 130 formasi

Rincian lebih lanjut terkait formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I pengumuman ini.

B. Jenis Alokasi Kebutuhan

Alokasi Kebutuhan CPNS Kabupaten Belu Tahun 2024 meliputi :

1. **Kebutuhan Umum** yang dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Kebutuhan Khusus** yang dialokasikan bagi :
   a. **Penyandang Disabilitas,** dengan ketentuan pelamar berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan video singkat yang menunjukkan

kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar; dan

b. Putra/Putri Daerah Tertinggal, dengan ketentuan pelamar dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Belu.

II. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, khusus pelamar untuk jabatan dokter spesialis batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun saat melamar;
3. Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Bersedia mengabdi di Pemerintah Kabupaten Belu dan tidak akan mengajukan pindah antar instansi Pemerintah paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
13. Calon pelamar hanya boleh mendaftar 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
14. Merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dari BAN-PTdan/atau PUSDIKNAKES/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan

15. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

B. Persyaratan Khusus

1. Pelamar **Formasi Umum** merupakan lulusan :
   Perguruan Tinggi dari Program Studi terakreditasi dalam BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan;
2. Pelamar **Formasi Disabilitas**:
   a. Merupakan lulusan Perguruan Tinggi dari Program Studi terakreditasi dalam BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan.
   b. Pada saat mendaftar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pada jabatan dan unit penempatan tertentu, wajib melampirkan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang menerangkan Jenis dan Derajat Kedisabilitasannya, dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.
   c. Pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi khusus, wajib datang memenuhi undangan dari Tim Verifikasi Administrasi jika diperlukan, untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
3. Pelamar **Formasi Putra/Putri Daerah Tertinggal :**
   a. Merupakan lulusan Perguruan Tinggi dari Program Studi terakreditasi dalam BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan.
   b. Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Belu yang merupakan daerah tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 pada saat pembuatan akun di SSCASN.
4. Bagi pelamar **Formasi Tenaga Kesehatan :**
   a. Dapat melihat rujukan kualifikasi pendidikan dan persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) pada Surat Edaran Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024 dan Keputusan Menteri PANRB nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024.
   b. STR harus masih berlaku / aktif pada saat pendaftaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.

5. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang melamar pada seleksi Pengadaan CPNS wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

III. UNGGAH DOKUMEN

Dokumen persyaratan wajib **dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas** dengan cara di***scan*** **berwarna** kemudian diunggah pada tahap unggah dokumen di SSCASN dengan format ukuran dan format berkas sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi yang terdiri dari:

NO	JENIS DOKUMEN YANG DIUNGGAH
1.	Surat Lamaran yang diketik, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai,- yang ditujukan kepada Bupati Belu di Atambua (format terlampir)
2.	Surat Pernyataan sesuai 5 point yang diketik, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai
3.	Surat Pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Belu dan tidak mengajukan pindah paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS yang diketik, ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (format terlampir)
4.	Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli
5.	Sertifikat atau Tangkapan Layar (Screenshot) pada PDDIKTI / BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah
6.	Ijazah Asli
7.	Transkrip Nilai Asli
8.	Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah
9.	STR Asli bagi tenaga kesehatan yang melamar pada jabatan yang mempersyaratkan STR
10.	Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar (untuk formasi Disabilitas)
11.	Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah dan Surat Pernyataan Disabilitas (untuk formasi Disabilitas)

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilakukan secara online mulai tanggal **20 Agustus s.d. 06 September 2024** dengan alur sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui https://sscasn.bkn.go.id dengan cara:
   a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar

mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/ melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
c. Mengunggah scan KTP dan swafoto;
d. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan dan foto yang diunggah sudah lengkap dan benar (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan

2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri dan memilih jenis disabilitas (bagi pelamar yang bukan penyandang disabilitas memilih non disabilitas, sedangkan bagi pelamar penyandang disabilitas memilih sesuai dengan jenis disabilitasnya untuk kemudian memasukkan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas);
4. Pelamar memilih jenis seleksi, yaitu seleksi CPNS;
5. Pelamar memilih instansi **Pemerintah Kabupaten Belu** dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi, nama program studi, dan akreditasi program studi;
6. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan;
7. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
8. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

V. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI

a. Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2024 terdiri atas 3 (tiga) tahapan dengan sistem gugur, yaitu:
   1. Seleksi Administrasi;
   2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
   3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
b. Pelaksanaan SKD dan SKB dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN; dan

c. SKB dilaksanakan setelah lulus SKD berdasarkan Nilai Ambang Batas *(Passing Grade)* sesuai Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

VI. TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI

Tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan dilaksanakan di **Aula Hotel Frawijaya, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara.**

VII. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d 28 November 2024

19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d 20 Desember 20244
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember s.d 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d 23 Maret 2025

VIII. LAIN-LAIN

1. Informasi lain mengenai penerimaan CPNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2024 dapat diakses melalui website https://sscasn.bkn.go.id, https://belukab.go.id dan Facebook : Bkpsdmd Kabupaten Belu;
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan **GUGUR;**
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan keputusan rapat dan persetujuan dari instansi yang berwenang;
4. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
5. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai CPNS, akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
6. Seluruh proses pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya;

7. Untuk lebih lanjut, mengenai waktu, tempat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penerimaan CPNS tahun 2024 dapat diakses pada website : https://belukab.go.id, dan Facebook : Bkpsdmd Kabupaten Belu;
8. Pelayanan dan penjelasan formasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Belu Tahun 2024 dapat menghubungi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kabupaten Belu pada setiap jam kerja;
9. Bagi PPPK Kabupaten Belu yang ingin mengikuti Seleksi Pengadaan CPNS Tahun 2024 baik di dalam maupun di luar instansi Pemerintah Kabupaten Belu agar segera melapor diri di BKPSDMD Kab. Belu untuk mengurus persetujuan PPK.
10. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;

Atambua, 19 Agustus 2024

a.n. BUPATI BELU
SEKRETARIS DAERAH,

JOHANES ANDES PRIHATIN, SE, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197411011999031006

LAMPIRAN
NOMOR : 931/800.1.2.2/BKPSDMD/VIII/2024
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELU
TAHUN ANGGARAN 2024

A. TENAGA TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	LOKASI FORMASI
1	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 PARIWISATA	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
2	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 HUKUM - S-1 TEKNIK MESIN	PENYANDANG DISABILITAS	2	PEMERINTAH KAB. BELU | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
3	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU KOMPUTER - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK KOMPUTER - D-IV TEKNIK INFORMATIKA	PENYANDANG DISABILITAS	2	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

4	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	PUTRA/PUTRI DAERAH TERTINGGAL	1	PEMERINTAH KAB. BELU | INSPEKTORAT KAB. BELU | INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH III
5	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 ILMU POLITIK - S-1 EKONOMI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 HUKUM	PUTRA/PUTRI DAERAH TERTINGGAL	1	PEMERINTAH KAB. BELU | INSPEKTORAT KAB. BELU | Inspektorat Pembantu Wilayah I
6	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN - S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL S-1 SOSIOLOGI - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 STATISTIKA	PUTRA/PUTRI DAERAH TERTINGGAL	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

7	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 PENYULUHAN PERKEBUNAN - S-1 PENYULUHAN PERTANIAN S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - D-IV PENYULUH PERTANIAN - S-1 AGRIBISNIS - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN - S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA - S-1 AGROTEKNOLOGI - D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 PENYULUHAN PERTANIAN LAHAN KERING - D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA - S-1 TEKNIK PERTANIAN	PUTRA/PUTRI DAERAH TERTINGGAL	2	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
8	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S-1 ILMU KOMUNIKASI - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 FILSAFAT	PUTRA/PUTRI DAERAH TERTINGGAL	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK
9	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	D-IV ANIMASI - S-1 MANAJEMEN - S-1 PARIWISATA - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

10	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & INFORMASI
11	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO
12	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK	UMUM	2	PEMERINTAH KAB. BELU | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
14	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 STATISTIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PENILAIAN ASET DAERAH

15	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 MANAJEMEN PAJAK	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG AKUNTANSI
16	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 STATISTIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH
17	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN DAN INFORMASI DIGITAL - S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN
18	ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP TERAMPIL	D-III PERIKANAN - D-III PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN - D-III KELAUTAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN PENGOLAHAN
19	AUDITOR AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN - D-IV ADMINISTRASI PUBLIK - D-IV AKUNTANSI - D-IV ADMINISTRASI PAJAK - S-1 ADMINISTRASI NEGARA - S-1 HUKUM - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ILMU HUKUM	UMUM	2	PEMERINTAH KAB. BELU | INSPEKTORAT KAB. BELU | Inspektorat Pembantu Wilayah I
20	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | INSPEKTORAT KAB. BELU | INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH IV

21	AUDITOR TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | INSPEKTORAT KAB. BELU | INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH II
22	AUDITOR TERAMPIL	D-III AKUNTANSI - D-III TEKNIK INFORMATIKA - D-III TEKNIK KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | INSPEKTORAT KAB. BELU | Inspektorat Pembantu Wilayah I
23	KURATOR	S-1 SENI PERTUNJUKAN - S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ARKEOLOGI - S-1 ILMU SEJARAH	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | BIDANG KEBUDAYAAN

24	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL AHLI PERTAMA	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK - D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK - D-IV RELASI INDUSTRI - S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 EKONOMI - S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA
25	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	UMUM	5	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

26	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 SASTRA INGGRIS - S-1 KIMIA - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 PSIKOLOGI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 BIOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	3	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | BIDANG KEBUDAYAAN
27	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	D-III PARAMEDIK VETERINER - D-III TEKNISI MEDIS VETERINER - D-III KESEHATAN TERNAK - D-III KESEHATAN HEWAN - D-III TEKNIK REPRODUKSI SATWA	UMUM	3	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | BIDANG KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
28	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUB BAGIAN UMUM & RUMAH TANGGA
29	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG NON MEDIK
30	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | PROGRAM & KEUANGAN | SEKSI PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

31	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BIDANG PELAYANAN | SEKSI KEPERAWATAN & KEBIDANAN
32	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER - S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & DIKLAT
33	PENATA KEPROTOKOLAN	S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL
34	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	D-III MANAJEMEN ASET - D-III TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI - D-III AKUNTANSI - D-III MANAJEMEN - D-III ADMINISTRASI BISNIS - D-III ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BAGIAN TATA USAHA | KEPALA SUB BAGIAN UMUM & RUMAH TANGGA
35	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	2	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG TATA RUANG

36	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	S-1 BISNIS - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 SAINS KOMUNIKASI - S-1 TEKNIK INDUSTRI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL - S-1 STUDI PEMERINTAHAN - S-1 USAHA KOPERASI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PERSYARATAN KERJA
37	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
38	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	D-IV MANAJEMEN AGRIBISNIS D-IV BISNIS KREATIF - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
39	PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA	D-IV PENYULUH PETERNAKAN D-IV PETERNAKAN - S-1 ILMU PETERNAKAN - S-1 PENYULUH PETERNAKAN	UMUM	4	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | BIDANG PERBIBITAN DAN PRODUKSI TERNAK

40	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL - D-IV PERBANKAN DAN KEUANGAN DIGITAL - D-IV ANALISIS KEUANGAN - S-1 EKONOMI KOPERASI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - D-IV AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH - S-1 ADMINISTRASI PAJAK - S-1 AGRIBISNIS - S-1 HUKUM - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 HUKUM BISNIS - S-1 USAHA KOPERASI	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN
41	PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA	D-IV PENYULUH PETERNAKAN - D-IV PETERNAKAN - D-IV TEKNOLOGI PETERNAKAN - S-1 ILMU PETERNAKAN - S-1 INDUSTRI PETERNAKAN - S-1 KIMIA - S-1 PENYULUH PETERNAKAN	UMUM	2	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | BIDANG PRASARANA DAN SARANA

42	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 ANTROPOLOGI - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | INSPEKTORAT KAB. BELU | INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH IV
43	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | INSPEKTORAT KAB. BELU | INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH V
44	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 HUKUM - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | INSPEKTORAT KAB. BELU | INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH II
45	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU POLITIK	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | INSPEKTORAT KAB. BELU | INSPEKTORAT PEMBANTU WILAYAH III
46	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK MESIN - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 HUKUM - S-1 EKONOMI	UMUM	4	PEMERINTAH KAB. BELU | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

47	PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP AHLI PERTAMA	D-IV PENYULUH PERIKANAN - S-1 PERIKANAN - S-1 ILMU PERIKANAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN PENGOLAHAN
48	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK PENGAIRAN - D-IV PLANOLOGI - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 PLANOLOGI - S-1 TEKNIK SUMBER DAYA AIR	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU| DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT | BIDANG SUMBER DAYA AIR
49	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRONOMI - S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN - S-1 BIOLOGI - S-1 AGROEKOTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) - S-1 AGROTEKNOLOGI (MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN / HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) - S-1 PERLINDUNGAN TANAMAN	UMUM	2	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
50	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA

51	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 AGRIBISNIS - D-IV PENYULUH PERTANIAN - S-1 AGROTEKNOLOGI - S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN - S-1 AGRIBISNIS HORTIKULTURA - S-1 PENYULUHAN PERTANIAN LAHAN KERING - D-IV AGRO BISNIS HORTIKULTURA - S-1 TEKNIK PERTANIAN - S-1 BUDIDAYA PERTANIAN - S-1 PENYULUHAN PERTANIAN - D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN - S-1 PENYULUHAN PERKEBUNAN	UMUM	28	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
52	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	UMUM	2	PEMERINTAH KAB. BELU | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
53	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

54	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - D-IV AKUNTANSI BISNIS DIGITAL - D-IV PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN EKONOMI MASYARAKAT - D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH - S-1 EKONOMI - S-1 EKONOMI, KEUANGAN, DAN PERBANKAN - S-1 LOGISTIK - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ADMINISTRASI BISNIS - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | SEKRETARIAT
55	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 PLANOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
56	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU EKONOMI - S-1 EKONOMI MANAJEMEN - S-1 ILMU SOSIAL - S-1 TEKNIK SIPIL - S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN - S-1 SOSIOLOGI - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 INFORMATIKA - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

57	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | SEKRETARIAT
58	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | SEKRETARIAT
59	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIK - S-1 STATISTIKA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
60	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 ADMINISTRASI	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM
61	PERENCANA AHLI PERTAMA	D-IV AKUNTANSI - D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN - S-1 AKUNTANSI - S-1 EKONOMI - S-1 STATISTIK	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
62	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI - S-1 MANAJEMEN - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

63	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS - S-1 FILSAFAT - D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT	UMUM	4	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK
64	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	3	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
65	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK ELEKTRO	UMUM	2	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
66	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK ELEKTRO	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
67	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM
68	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
69	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

70	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER GRAFIS - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	UMUM	2	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI
71	SANDIMAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK KOMPUTER - D-IV TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN - D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI - D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - D-IV REKAYASA KEAMANAN SIBER - S-1 ILMU KOMPUTER - S-1 TEKNIK ELEKTRO	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK
72	STATISTISI AHLI PERTAMA	D-IV SAINS DATA TERAPAN - S-1 MATEMATIKA - S-1 STATISTIKA - S-1 STATISTIKA TERAPAN - S-1 SAINS DATA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG PERSANDIAN DAN STATISTIK

73	TEKNISI KESEHATAN IKAN TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA - D-III PERIKANAN BUDIDAYA - D-III BUDIDAYA KELAUTAN - D-III TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN - D-III BUDIDAYA PERIKANAN - D-III BUDI DAYA IKAN	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

B. TENAGA KESEHATAN

NO	NAMA JABATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	LOKASI FORMASI
1	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	PENYANDANG DISABILITAS	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG NON MEDIK
2	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS RAFAE
3	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LAKTULUS | LAKTULUS
4	APOTEKER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS UMANEN
5	APOTEKER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WELULI
6	APOTEKER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DILUMIL
7	APOTEKER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SILAWAN

8	APOTEKER AHLI PERTAMA	UMUM	2	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK & CATATAN MEDIK
9	APOTEKER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS NUALAIN
10	APOTEKER AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KOTA ATAMBUA
11	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	UMUM	2	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS RAFAE
12	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS ATAPUPU
13	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DILUMIL
14	BIDAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WELULI
15	BIDAN AHLI PERTAMA	UMUM	4	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BIDANG PELAYANAN | SEKSI KEPERAWATAN & KEBIDANAN
16	BIDAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU| DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS RAFAE
17	BIDAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WELULI
18	BIDAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LAKTULUS | LAKTULUS
19	BIDAN TERAMPIL	UMUM	7	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BIDANG PELAYANAN | SEKSI KEPERAWATAN & KEBIDANAN

20	BIDAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS UMANEN
21	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS PENYAKIT DALAM-HEMATOLOGI-ONKOLOGI MEDIK	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | SMF
22	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HALILULIK
23	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WEBORA
24	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	2	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS NUALAIN
25	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HAEKESAK
26	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS RAFAE
27	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	11	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | SMF | DOKTER UMUM
28	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LAKTULUS | LAKTULUS
29	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS ATAPUPU
30	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DILUMIL
31	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS AULULIK
32	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	UMUM	2	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WELULI

33	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | SMF
34	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | SMF
35	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU| DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | SMF
36	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | SMF
37	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | SMF
38	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | SMF
39	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | SMF
40	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS UROLOGI	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | SMF
41	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS AULULIK
42	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HALIWEN

43	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS AINIBA
44	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS SILAWAN
45	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS ATAPUPU
46	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS RAFAE
47	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DILUMIL
48	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WEDOMU
49	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HALILULIK
50	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WEBORA
51	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WELULI
52	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HAEKESAK
53	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WEDOMU

54	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS ATAMBUA SELATAN
55	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK & CATATAN MEDIK
56	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS ATAMBUA SELATAN
57	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG NON MEDIK
58	NUTRISIONIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG NON MEDIK
59	NUTRISIONIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HALILULIK
60	PERAWAT AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WEDOMU
61	PERAWAT AHLI PERTAMA	UMUM	15	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BIDANG PELAYANAN | SEKSI KEPERAWATAN & KEBIDANAN
62	PERAWAT AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS UMANEN
63	PERAWAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WELULI | MAUDEMU

64	PERAWAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LAKTULUS | LAKTULUS
65	PERAWAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS KOTA ATAMBUA
66	PERAWAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WEBORA
67	PERAWAT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DILUMIL
68	PERAWAT TERAMPIL	UMUM	16	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BIDANG PELAYANAN | SEKSI KEPERAWATAN & KEBIDANAN
69	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS NUALAIN
70	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DILUMIL
71	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WELULI
72	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS ATAMBUA SELATAN
73	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WEDOMU
74	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS AULULIK
75	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HAEKESAK
76	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HALIWEN

77	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG MEDIK & CATATAN MEDIK
78	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LAKTULUS | LAKTULUS
79	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS UMANEN
80	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WELULI
81	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS AINIBA
82	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HALILULIK
83	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | BIDANG PENUNJANG | SEKSI PENUNJANG NON MEDIK
84	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LAKTULUS | LAKTULUS
85	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WELULI
86	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS DILUMIL
87	TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS NUALAIN

88	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS AINIBA
89	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS NUALAIN
90	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS AULULIK
91	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WELULI
92	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LAKTULUS | LAKTULUS
93	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS WEDOMU
94	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HALIWEN
95	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS RAFAE
96	TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS ATAPUPU
97	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | RSUD MGR Gabriel Manek | SMF
98	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS HAEKESAK
99	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU | DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS ATAMBUA SELATAN

100	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	UMUM	1	PEMERINTAH KAB. BELU| DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS LAKTULUS | LAKTULUS

a.n. BUPATI BELU
SEKRETARIS DAERAH,

JOHANES ANDES PRIHATIN, SE, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197411011999031006

FORMAT SURAT LAMARAN

Atambua, ... Agustus 2024

Perihal : Lamaran Mengikuti Seleksi CPNS Tahun 2024

Kepada
Yth. Bupati Belu
di -
TEMPAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	*(Sesuai dengan Ijazah)*
NIK	:	*(Sesuai KTP)*
Tempat Lahir	:	*(Nama Kabupaten tempat lahir)*
Tanggal Lahir	:	*(Sesuai KTP)*
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Pendidikan Terakhir	:	*(Pendidikan sebagai dasar lamaran)*
Alamat	:	
Nomor Telepon/Hp	:	*081xxxxxxxxx*
Email	:	*(email aktif)*

Bersama ini menyampaikan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat dipertimbangkan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan formasi :

Nama Jabatan : ..... *(nama jabatan formasi yang dilamar)*
Unit Penempatan : .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan :

1. Scan Ijazah Asli ;
2. Scan Transkip Nilai Asli;
3. Scan KTP Asli;
4. Scan Surat pernyataan 5 point;
5. Scan Surat pernyataan bersedia mengabdi di Kabupaten Belu
6. Scan Scan Bukti Perguruan Tinggi dan Program Studi terakreditasi BAN-PT;
7. Pas Photo terbaru dengan latar warna merah;
8. Scan STR Asli (*bagi pelamar jabatan fungsional kesehatan yang mempersyaratkan STR*);
9. Scan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya (*bagi pelamar penyandang disabilitas*)

Demikian lamaran ini dibuat dan atas perkenannya dihaturkan limpah terima kasih.

Hormat Saya,

e-Meterai
Rp. 10.000

_____

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGABDI DI KABUPATEN BELU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	:
Tempat / Tanggal Lahir	:
NIK	:
Agama	:
Jenis Kelamin	:
Alamat	:
Jabatan yang dilamar	:
Unit Kerja Penempatan	:

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengabdi pada **Pemerintah Kabupaten Belu**, tidak akan mengajukan permohonan pindah tugas antar instansi pemerintah dengan alasan apapun selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. Apabila saya tetap mengajukan pindah, maka saya dianggap mengundurkan diri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Belu, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atambua, ….. Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,

e-Meterai
Rp. 10.000

……

FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 POINT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Tempat dan Tanggal Lahir : .....
Agama : .....
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Atambua, Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

e-Meterai
Rp. 10.000

.....